

# PENGEMBANGAN PARIWISATA BONO BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Oleh

**Berto Addriyanto<sup>1</sup>**

**Muh. Ilham<sup>2</sup>, Ella Wargadinata<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
riberscarwash2017@gmail.com

<sup>2,3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

## ABSTRACT

*This study aims to describe the Development of Community-based Bono Tourism in Pelalawan District, Riau Province. The supporting factors and inhibiting factors to overcome the obstacles that might influence the Bono tourism development process in Pelalawan District. The research method uses a descriptive qualitative approach by using Yaman & Mohn CBT Theory.*

*Based on the results of the research that the Development of Community-based Bono Tourism in Pelalawan Regency, Riau Province is seen from the indicators of Government Support, Stakeholder Participation, Fair Profit Sharing, Local Resource Use, and Strengthening of Local Institutions has not been maximized. This can be seen from the lack of budget and the lack of participation of the district government and access to Bono tourism objects has not been maximized.*

**Keywords:** *development, tourism, community based.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun Faktor pendukung dan faktor penghambat untuk mengatasi hambatan yang mungkin memengaruhi dalam proses pengembangan pariwisata Bono di Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori CBT Yaman & Mohn.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dilihat dari indikator Dukungan Pemerintah, Partisipasi dari Stakeholder, Pembagian Keuntungan yang Adil, Penggunaan Sumber Daya Lokal, dan Penguatan Institusi Lokal belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran dan kurangnya partisipasi Pemerintah Kabupaten Serta akses menuju objek wisata Bono belum maksimal.

**Kata kunci:** pengembangan, pariwisata, berbasis masyarakat

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sangat kaya dengan kekayaan alam.

Hampir semua daerah meliputi provinsi, kota, kabupaten dan desa memiliki aneka ragam kekayaan alam baik kekayaan alam di darat maupun di laut. Aneka ragam kekayaan

alam tersebut merupakan aset daerah yang pemanfaatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi yang nyata terhadap pola hubungan pusat dan daerah. Sebagaimana konsekuensi logis dari keberadaan undang-undang tersebut, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Industri pariwisata merupakan sektor yang memberi harapan yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi di banyak Negara sehingga sektor pariwisata memegang peranan penting dalam produk domestik bruto (PDB). Selain itu, sektor pariwisata juga dianggap memiliki efek ganda (*multiplier effect*) dan dapat menggerakkan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat karena wisata terkait langsung dengan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan ekonomi negara.

Sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan (*Community Based Tourism*) harus menjadi landasan dan acuan yang penting dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional (WOT, 2000 dalam subadra.wordpress.com). *Community Based Tourism Development* pada hakikatnya adalah pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal di mana pariwisata itu berkembang sehingga mempunyai dampak nyata terhadap ekonomi mereka secara keseluruhan.

Salah satu kekayaan Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan, yang mempunyai wisata tidak kalah baik dengan wisata lainnya, dengan keberadaan kantor yang telah lama

terbentuk, APBD Kabupaten Pelalawan yang besar dan lebih lanjut Objek Wisata Bono ini masuk dalam Kawasan Unggulan I, seharusnya objek wisata andalan Kabupaten Pelalawan, tetap kondisi di lapangan justru kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten. Dari tahun-tahun anggaran kantor kebudayaan dan pariwisata yang telah lewat, hanya pada anggaran tahun anggaran 2012 yang memasukkan Wisata Bono dalam program pembangunan salah satunya, yaitu kegiatan pengadaan perlengkapan sarana penunjang Objek Wisata Bono *Surfing*.

Secara ilmiah, gelombang Bono merupakan salah satu peristiwa alam yang cukup langka dan jarang terjadi. di mana kita akan melihat gelombang besar yang layaknya terjadi di laut, tetapi ini terjadi pada sungai air tawar. Gelombang Bono terjadi diakibatkan benturan tiga arus air yang berasal dari Selat Melaka, Laut China Selatan dan Aliran air Sungai Kampar. Akibat benturan ini, menjadikan gelombang air di muara Sungai Kampar bisa mencapai ketinggian 4-5 meter dengan ditandai sebelumnya dengan suara gemuruh yang hebat.

### Perumusan Masalah

Bertolak dari paparan di atas, dapat dirumuskan masalah Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) sebagai berikut.

1. Bagaimana program pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengembangkan pariwisata Bono berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi pengembangan pariwisata Bono berbasis masyarakat di Pelalawan tidak dapat berkembang?
3. Bagaimana peran Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam mendukung

masyarakat sebagai penggerak pariwisata berbasis masyarakat?

## Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap dan menganalisis pengembangan pariwisata Bono berbasis masyarakat (*community based tourism*) menganalisis faktor pendukung dan menghambat, serta menganalisis bagaimana peran Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam mendukung masyarakat sebagai penggerak pariwisata berbasis masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mengembangkan pariwisata Bono berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan pariwisata Bono di Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk Menganalisis Bagaimana peran Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam mendukung masyarakat sebagai penggerak pariwisata berbasis masyarakat?

## KAJIAN PUSTAKA

### Otonomi Daerah

Era Otonomi Daerah sebagai implikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi setiap pemerintah kabupaten/kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntunan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring,

dan evaluasi. Dalam pembangunan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pada konsep otonomi daerah terkandung azas-azas dan prinsip-prinsip kemandirian daerah dalam pelaksanaannya. Walaupun otonomi itu sebagai bentuk pelimpahan yang luas atas kewenangan daerah, namun keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan Negara. Diberikannya hak dan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada badan-badan otonomi, seperti: provinsi, kabupaten/kota, maka badan-badan tersebut dengan kekuasaannya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau perundangan yang lebih tinggi dan mampu menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### Pendapatan Daerah

Memperoleh sumber keuangan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah sangatlah sulit. Bantuan keuangan yang besar berasal dari pemerintah pusat, hal ini menyebabkan ketergantungan daerah pada bantuan tersebut sebab dari dana bantuan pusat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan berbagai tugas pelayanan kepada masyarakat. Tetapi ketergantungan keuangan ini menimbulkan akibat "penyelenggaraan otonomi daerah tidak sepenuhnya dapat berjalan dan di pihak

lain mengundang kuatnya campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah “ (Kaho, 1988: 177).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menduduki posisi yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah, PAD diharapkan menjadi pilar utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan penerimaan yang bersumber di luar PAD hanya sebagai pendukung saja. Demikian juga dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber keuangan yang paling utama di samping penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pengembangan

Pengembangan itu sendiri tidak terlepas di dalamnya suatu upaya atau usaha pengembangan dari objek yang sudah dibangun. Karenanya pengembangan akan dapat dimengerti apabila kita akan memahami arti dari pembangunan itu sendiri. Keberhasilan pengembangan ditentukan oleh tiga faktor sebagaimana dikemukakan oleh Yoeti (1996: 303): Ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan, yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata; adanya fasilitas *accessibility*, yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata; terjadinya fasilitas *admittees*, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Yoeti (1996: 1970) mengemukakan bahwa sarana pariwisata adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Pengembangan Kepariwisata dewasa ini secara sadar telah digiatkan di sebagian negara-negara di dunia.

### Pariwisata

Definisi pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”. Sementara itu, menurut Marpaung (2002: 13) mendefinisikan “pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka”.

Adapun batasan pariwisata yang diberikan oleh Yoeti (2008: 100) adalah salah satu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang di kunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam di luar mencari nafkah.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik simpulan bahwa dalam pariwisata terdapat beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Terdapat aktivitas perjalanan manusia dari tempat Asal ke lokasi tujuan wisata dan sebaliknya.
2. Tujuan utama dari perjalanan tersebut adalah selain dari mencari pekerjaan.
3. Status di tempat yang dituju adalah hanya untuk tinggal sementara dan tidak untuk menetap.

### Wisata Alam Bono

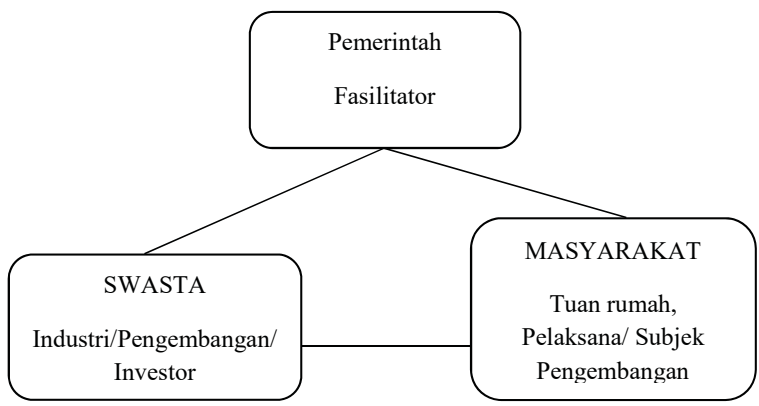
Secara ilmiah, gelombang Bono merupakan salah satu peristiwa alam yang cukup langka dan jarang terjadi. di mana

kita akan menyaksikan sebuah gelombang besar yang layaknya terjadi di tengah laut, namun ini terjadi di sebuah sungai air tawar. Gelombang Bono terjadi diakibatkan benturan tiga arus air yang berasal dari Selat Melaka, Laut China Selatan, dan Aliran Sungai Kampar. Akibat benturan ini, menjadikan gelombang air di muara Sungai Kampar bisa mencapai ketinggian 4-5 meter dengan ditandai sebelumnya dengan suara gemuruh yang hebat.

**Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)**

Sinclair (1998) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam, pariwisata.



**Gambar 1**  
Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata  
Sumber: Sunaryo (2013: 217)

Menurut Teori Yaman & Mohd (2004: 584) dalam Nurhidayati (2012) beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan *Community Based Tourism (CBT)* sebagai berikut.

- a. Adanya dukungan pemerintah  
CBT membutuhkan dukungan struktur yang multiinstitusional agar sukses dan berkelanjutan. Pendekatan CBT berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pemberantasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga sumber daya alam dan budaya.
- b. Partisipasi dari *stakeholder*  
CBT dideskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian/penghidupan masyarakat.
- c. Pembagian keuntungan yang adil  
Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha.

d. Penggunaan sumber daya lokal

Salah satu kekuatan pariwisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. di mana asset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat.

e. Penguatan institusi lokal

Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah perdesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya, dan pengunjung.

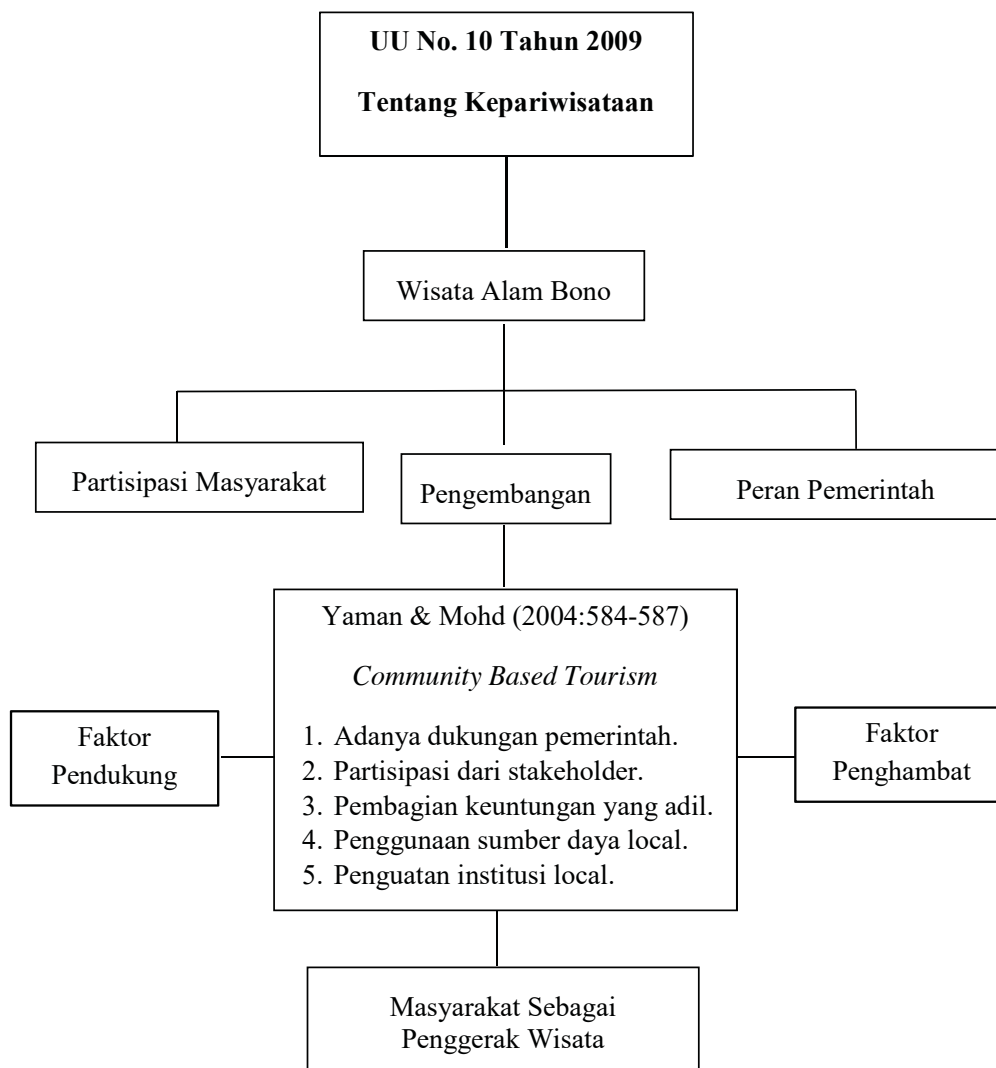
**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran tentang Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tampak pada Gambar 2.

**METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah survei deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini. Survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan yang mewakili.

Penentuan informan dalam penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono.



**Gambar 2.**  
Kerangka pemikiran

2005: 52). Informan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, yaitu Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pariwisata, Camat Telukmeranti, dan masyarakat.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara dengan informan;
2. Monografi Kabupaten Pelalawan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan.

Adanya dukungan pemerintah, partisipasi dari *stakeholder*, pembagian keuntungan yang adil, penggunaan sumber daya lokal dan penguatan institusi lokal.

### **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Agar memperoleh data yang lengkap, benar dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, di mana peneliti akan hadir secara langsung di lokasi penelitian dalam melaksanakan pengumpulan data.

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah editing, klasifikasi tabulasi data, interpretasi data, pengambilan simpulan dan verifikasi yang melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna terhadap data yang tersaji.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

Pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis

pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power daya atau empowering dari golongan masyarakat yang powerless tidak berdaya, biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

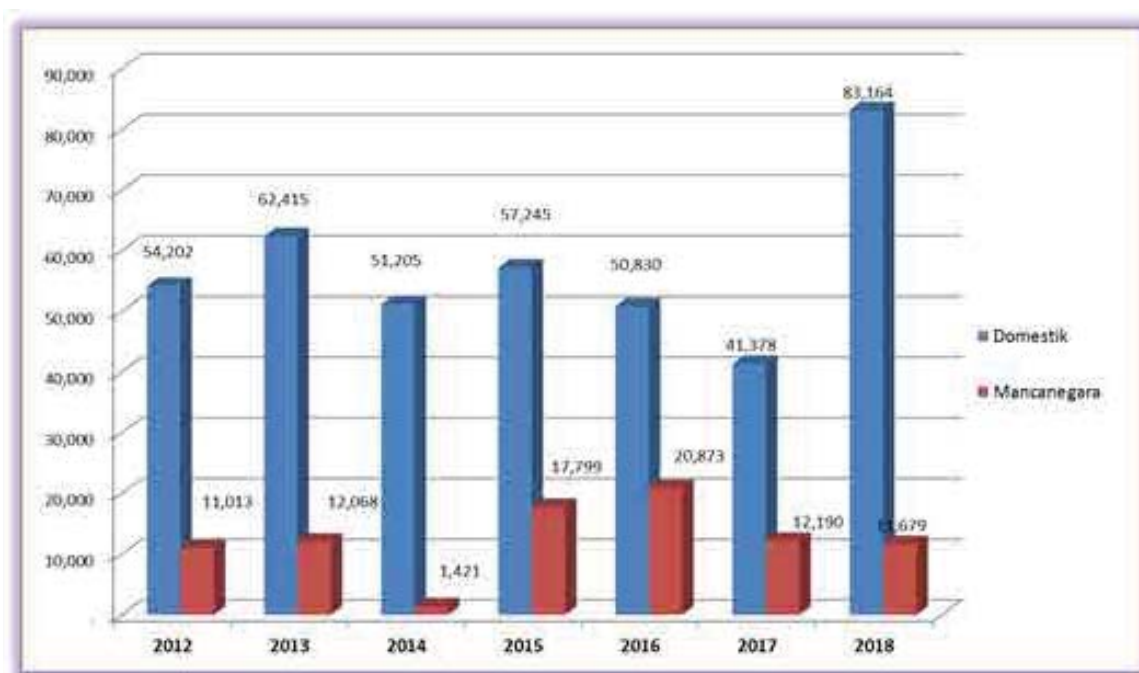
Yaman & Mohd (2004: 584) dalam Nurhidayati (2012) mengungkapkan bahwa konsep pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT, yaitu adanya dukungan struktur yang multiinstitusional, dukungan perencanaan, dukungan pelaksanaan, pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat agar sukses berkelanjutan, pendekatan CBT berorientasi oada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pemberantasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga sumber daya alam dan budaya. Maka dari itu pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, coordinator atau badan penasihat SDM dengan penguatan kelembagaan.

Provinsi Riau khususnya Kabupaten Pelalawan memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah seperti salah satunya dari sektor minyak dan gas (Migas). Hanya saja, potensi di bidang migas ini, masih belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan sehingga diperlukan adanya upaya untuk menggali potensi lain salah satunya potensi pariwisata Bono di mana objek pariwisata gelombang Bono yang telah di kenal dunia ini, sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berikut rekapitulasi kunjungan sektor pariwisata di Kabupaten Pelalawan:

**Tabel 1** Rekapitulasi Kunjungan Pariwisata di Kabupaten Pelalawan 2012-2018

No.	Tahun	Domestik	Mancanegara	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1	2014	51.205	1.142	52.347	2.78%
2	2015	57.245	17.799	75.044	31.09%
3	2016	50.830	20.873	71.703	41.06%
4	2017	41.378	12.190	53.568	29.46%
5	2018	83.164	11.679	94.843	14.04%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, 2018



**Gambar 3**  
Rekapitulasi Pengunjung Pariwisata di Kabupaten Pelalawan

Tabel 1 di atas menunjukkan pertumbuhan kunjungan Pariwisata di Kabupaten Pelalawan 2012-2018 yang selalu ada peningkatan tiap tahun. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan secara langsung dapat dikatakan sebagai dinas penghasil karena dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai objek wisata di Kabupaten Pelalawan. di samping itu dinas kebudayaan dan pariwisata juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk kemudahan-kemudahan pengurusan berbagai izin travel dan biro

perjalanan, penginapan, dan tempat-tempat hiburan.

### Adanya Dukungan Pemerintah

Adanya dukungan pemerintah diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan berikut ini.

“Adapun langkah awal perencanaan yang dilakukan Kepala Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga dalam pengembangan pariwisata Bono, yaitu berupa dukungan pariwisata agar dapat hidup dan berkembang serta dapat

Bekudo Bono (Surfing Lokal). Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan mengatakan pada saat di wawancara (26/6/19) bahwa:

“Pelaksanaan pengembangan Bono yang dilakukan, yaitu membuat kegiatan event surfing berkuda Bono setiap tahunnya dan mempromosikan Bono kepada wisatawan mancanegara untuk melakukan surfing Bono dan mengenalkan olahraga surfing kepada masyarakat lokal karena sebelumnya surfing tidak pernah dilakukan oleh masyarakat lokal karena ketidakhahaman terhadap olahraga surfing tersebut dan turislah yang pertama mengenalkan surfing di Bono tersebut, dan selanjutnya menyediakan sarana air seperti boat menuju aliran *surfing* Bono serta *jet sky* dan papan *surfing*. Even tersebut hanya diadakan satu kali dalam setahun karena Bono tersebut merupakan wisata musiman, dan pemerintah juga mempromosikan wisata yang tidak jauh dari objek wisata

Bono, yaitu hutan pinus dan rumah rakit terapung di kecamatan kerumutan”.

Dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata Bono selanjutnya mengadakan pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat Kecamatan Telukmeranti dalam hal pelatihan pengembangan pariwisata Bono berbasis masyarakat mempunyai strategi, yaitu memberikan Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana serta melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan di bidang Kepariwisataaan, memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi kegiatan wisata serta pengelolaan dan pelestarian kebudayaan, mengoptimalkan kemitraan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata, meningkatkan promosi khusus dalam penggunaan media sosial seperti *instagram*, *twiterr*, *blogger*, *facebook*, meningkatkan kemitraan dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat serta kelompok paguyuban *tour and travel*, para blogger Pekanbaru. Kepala

**Tabel 2** Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pelalawan

No	Objek Wisata Di Kabupaten Pelalawan	Jenis Wisata	Keterangan
1	Kec. Teluk Meranti Pantai Ogis Bono	Alam Alam	Rekreasi Pantai Rekreasi Pantai
2	Kec. Pangkalan Kerinci Danau Tanjung Putus Danau Tawid	Alam Alam	Wisata hutan dan danau Wisata hutan dan danau
3	Kec Pelalawan Istana Sayap Makam Raja-Raja Pelalawan Merupakan Penggalan Kerajaan Pelalawan	Sejarah/budaya Sejarah/budaya Sejarah/budaya	Peninggalan sejarah Sultan Syarif Qasim II. Kompleks Makam Kerajaan dan keluarga Kerajaan Peninggalan Pelalawan

**Sumber:** Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pelalawan 2017

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengatakan pada saat diwawancara (26/6/19) bahwa:

“Untuk pelatihan dan penyuluhan pengembangan wisata Bono, yaitu pembinaan masyarakat melalui pelatihan *surfing* dan *rescue* di Jawa Barat pada 2013. Program pelatihan peningkatan partisipasi masyarakat di Bidang Bina Wisata. Tujuan program ini adalah melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap SDM dan pelaku pariwisata, termasuk penguatan jati diri sebagai masyarakat berbudaya Melayu, dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata, membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata, Revitalisasi seni dan budaya lokal masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan unsur-unsur sapta pesona lomba desa wisata.

### Partisipasi dari Stakeholder

Perkembangan pariwisata tidak lepas dari peran *stakeholders* untuk berperan aktif dalam pengembangan objek wisata termasuk wisata bahari, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Camat Telukmeranti menanggapi pada saat di wawancara (24/6/19) bahwa:

“Camat Telukmeranti telah melakukan upaya dalam mengembangkan objek wisata Bono berbasis masyarakat, yaitu melakukan pelebaran jalan menuju objek wisata, perluasan area parkir, pembangunan MCK, penyediaan kios-kios makanan, area permainan dan disiplin kebersihan lingkungan. Camat Telukmeranti mengajak masyarakat untuk merencanakan kegiatan pengembangan pariwisata Bono dan mengajak masyarakat menyediakan rumah mereka untuk dijadikan penginapan, *homestay*.”

### Penguatan Institusi Lokal

Masyarakat Telukmeranti dalam hal pengembangan memiliki koperasi desa, yaitu Koperasi Meranti Emas tetapi ini beroperasi tanpa legalitas yang jelas, dan tidak pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. Padahal lahan seluas lebih kurang 3000 hektar tersebut sudah ditunjuk sebagai areal percetakan sawah untuk masyarakat Kelurahan Telukmeranti sejak tahun 2006 oleh Pemkab Pelalawan. Pemerintah daerah dan pusat mengajak pemerintah desa sekitar Bono untuk mengembangkan Bono dalam event berduka Bono, membuat program desa dalam mengembangkan wisata Bono. Masyarakat harus ikut berpartisipasi mengembangkan dan menjaga lingkungan di sekitar Bono. Pemerintah pusat maupun kabupaten memberikan sumbangan terhadap pengembangan Bono, yaitu berupa pelatihan dan menyediakan alat-alat transportasi air. Berdasarkan hasil wawancara kepada Lurah Telukmeranti (26/6/19) mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa sudah berupaya untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengembangkan wisata Bono, menjaga lingkungan, kebersihan di area objek wisata Bono, menyediakan penginapan atau *homestay*, lahan parkir serta pelatihan dalam pengembangan Bono. Sementara ini masyarakat belum bisa menerima budaya luar seperti turis asing yang datang berpakaian terbuka dan membawa minuman keras, sehingga masyarakat dan tokoh adat yang ada di Telukmeranti mengharapkan kepada pemerintah pusat membuat tempat khusus untuk turis dalam mengunjungi wisata Bono ini karena adanya budaya luar yang dibawa oleh turis mancanegara agar tidak mengganggu pemuda atau masyarakat yang ada disekitaran objek wisata Bono”

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil simpulan dan pembahasan Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menyimpulkan bahwa Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism/CBT*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dapat dilihat dari:

- a. Dukungan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan wisata Bono dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran dan pencapaian target yang belum sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Partisipasi dari *stakeholder* dalam mengembangkan pariwisata Bono masyarakat sudah sepenuhnya bersedia dalam mengembangkan pariwisata Bono tetapi kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan swasta untuk memfasilitasi Desa Telukmeranti sehingga pengembangan pariwisata Bono tergolong lambat, dan juga belum sepenuhnya akses jalan menuju wisata Bono di Kecamatan Telukmeranti masih berlobang dan licin, jalan setapak yang sudah rusak dan serta infrastruktur bangunan di objek wisata Bono tidak terawat karena akses jalan belum dibenahi.
- c. Pembagian keuntungan yang adil dalam pengelolaan wisata Bono masyarakat turut berperan aktif selama pengadaan event Bono, masyarakat memiliki usaha dalam sektor wisata, keuntungan tidak langsung yang seharusnya diterima masyarakat jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan dari pemerintah daerah maupun pusat, tetapi masyarakat belum merasakan hal itu karena lambatnya peran pemerintah dalam pengembangan wisata Bono maupun bantuan dana desa.

- d. Penggunaan sumber daya lokal dalam pengembangan pariwisata Bono berbasis masyarakat di mana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan, masyarakat menjadikan rumah mereka sebagai penginapan atau *homestay* serta memfasilitasi kamar tidur, tempat mandi, dan masak untuk wisatawan yang datang dalam event Bono setiap tahunnya.
- e. Penggunaan institusi lokal dalam pengembangan pariwisata Bono berbasis masyarakat belum cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam peluang usaha sulit diatur oleh lembaga yang ada, pentingnya untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk dan sumber daya pengunjung. Pemerintah kabupaten belum sepenuhnya menjalankan program

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan di atas terkait Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau penulis memberikan saran sebagai berikut.

### Saran Teoretis

1. Perlu dikaji secara mendalam mengenai pengembangan pariwisata Bono agar wisata Bono menjadi wisata unggulan Provinsi Riau
2. Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan objek penelitian yang sama, diharapkan dapat menggunakan desain penelitian dan teknik analisis data yang berbeda agar lebih memperbanyak sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait permasalahan yang diangkat.

## Saran Praktis

Hendaknya pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau perlu ditingkatkan lagi melalui aspek, adanya dukungan pemerintah, partisipasi *stakeholder*, pembagian keuntungan yang adil, penggunaan sumber daya lokal, dan penguatan institusi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- CIFOR. 2004. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. CIFOR, Bogor.
- Suansri, P. 2003. *community Based Tourism Handbook*. Bangkok, Thailand: Responsible Ecological Social Tours (REST) Project.
- Kaho. Joseph Riwo, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Kansil, CST dan Chirstine, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung. Happy *et al*, 2002 *Pengantar Pariwisata*, Alfabeta, Bandung.
- Ngapena, Chafid, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Liberty, Yogyakarta.
- Nyoman. S. Pandit, 2004, *Ilmu Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita, PT. Angkasa, Bandung.